

BERITA RESMI STATISTIK



Badan Pusat Statistik
Provinsi Aceh

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2020 Provinsi Aceh

Indeks
Demokrasi
Indonesia (IDI)
2020 Provinsi
Aceh Mencapai
73,93.

- IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*).
- Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu : (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) *Focus Group Discussion* (FGD), dan (4) wawancara mendalam.
- Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2020 Provinsi Aceh mencapai angka 73,93 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan angka IDI 2019 yang sebesar 78,00. Capaian kinerja demokrasi Prov. Aceh tersebut masih berada pada kategori “sedang”. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).
- Perubahan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Aceh dari 2019-2020 dipengaruhi oleh tiga aspek demokrasi yakni (1) Kebebasan Sipil yang turun 8,79 poin (dari 93,28 menjadi 84,49), (2) Hak-Hak Politik turun 0,28 poin (dari 65,22 menjadi 64,94), dan (3) Lembaga Demokrasi yang turun 4,17 poin (dari 79,08 menjadi 74,91).

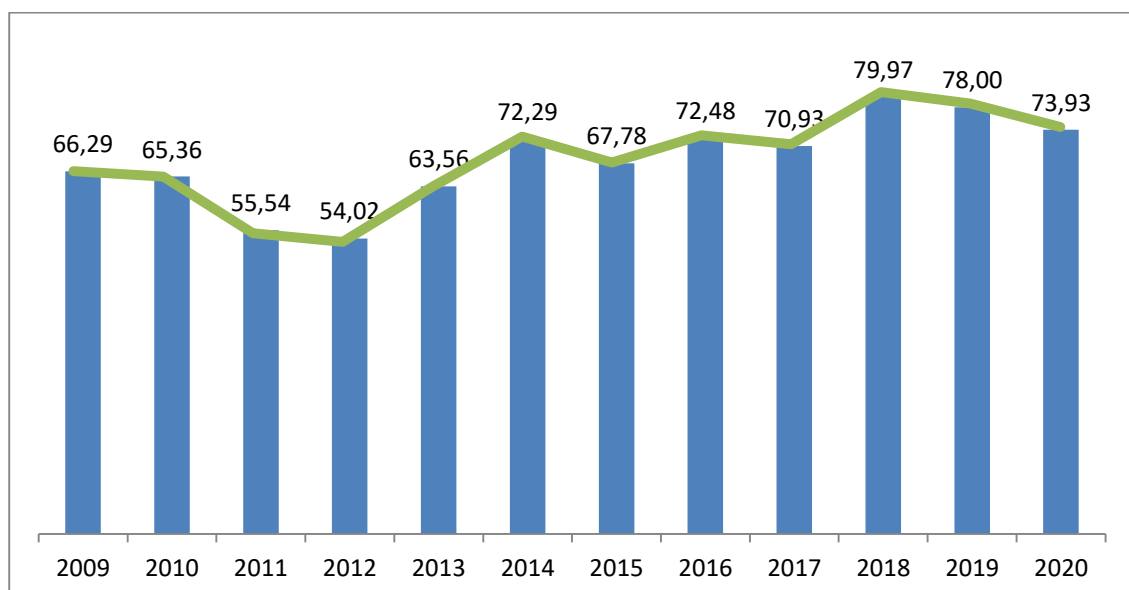
1. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia 2020 Provinsi Aceh

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Aceh tahun 2020 mencapai 73,93 dalam skala indeks 0 sampai 100. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2019 yang capaiannya sebesar 78,00. Meskipun mengalami penurunan angka, tingkat demokrasi Provinsi Aceh tersebut masih termasuk dalam kategori “sedang”.

Capaian IDI Provinsi Aceh dari tahun 2009 hingga 2020 mengalami fluktuasi. Pada awal mula dihitung tahun 2009, capaian IDI Aceh sebesar 66,29. Selanjutnya sampai dengan tahun 2012, capaian IDI Aceh cenderung menunjukkan penurunan. Peningkatan capaian IDI Aceh terjadi pada tahun 2013 dan 2014 yaitu menjadi sebesar 63,56 dan 72,29. Fluktuasi capaian IDI aceh terjadi pada periode 2015-2018, dimana capaian IDI pada tahun 2015 yang sebesar 67,78 lalu naik menjadi 72,48 di tahun 2016, namun kembali turun menjadi 70,93 pada tahun 2017. Hal yang cukup baik terlihat pada tahun 2018, dimana capaian IDI Aceh meningkat cukup signifikan menjadi 79,97. Namun arah yang berbeda terjadi pada tahun 2019 dimana capaian IDI Aceh turun menjadi 78,00 dan kembali turun pada tahun 2020 menjadi 73,93.

Fluktuasi angka IDI adalah cerminan situasi dinamika demokrasi di Provinsi Aceh. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. IDI disusun secara cermat berdasarkan kejadian (*evidence-based*) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi.

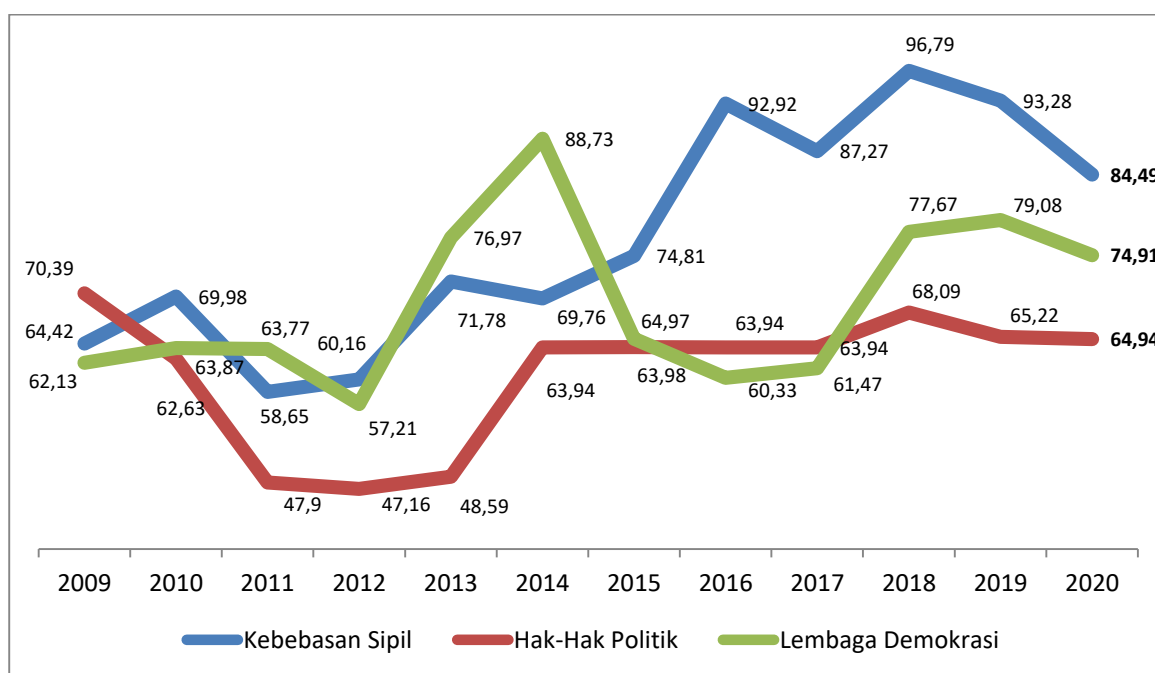
Grafik 1. Perkembangan IDI Provinsi Aceh, 2009-2020



2. Perkembangan Indeks Aspek-Aspek IDI

Angka IDI 2020 Provinsi Aceh merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni aspek Kebebasan Sipil yang bernilai 84,49; aspek Hak-Hak Politik yang bernilai 64,94; dan aspek Lembaga Demokrasi yang bernilai 74,91.

Grafik 2. Perkembangan Indeks Aspek IDI Provinsi Aceh, 2009-2020



Pada tahun 2020, semua aspek penyusun angka IDI mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Nilai indeks dari aspek kebebasan sipil merupakan yang tertinggi dibanding dua aspek lainnya. Sedangkan aspek hak-hak politik merupakan aspek yang nilai indeksnya terendah.

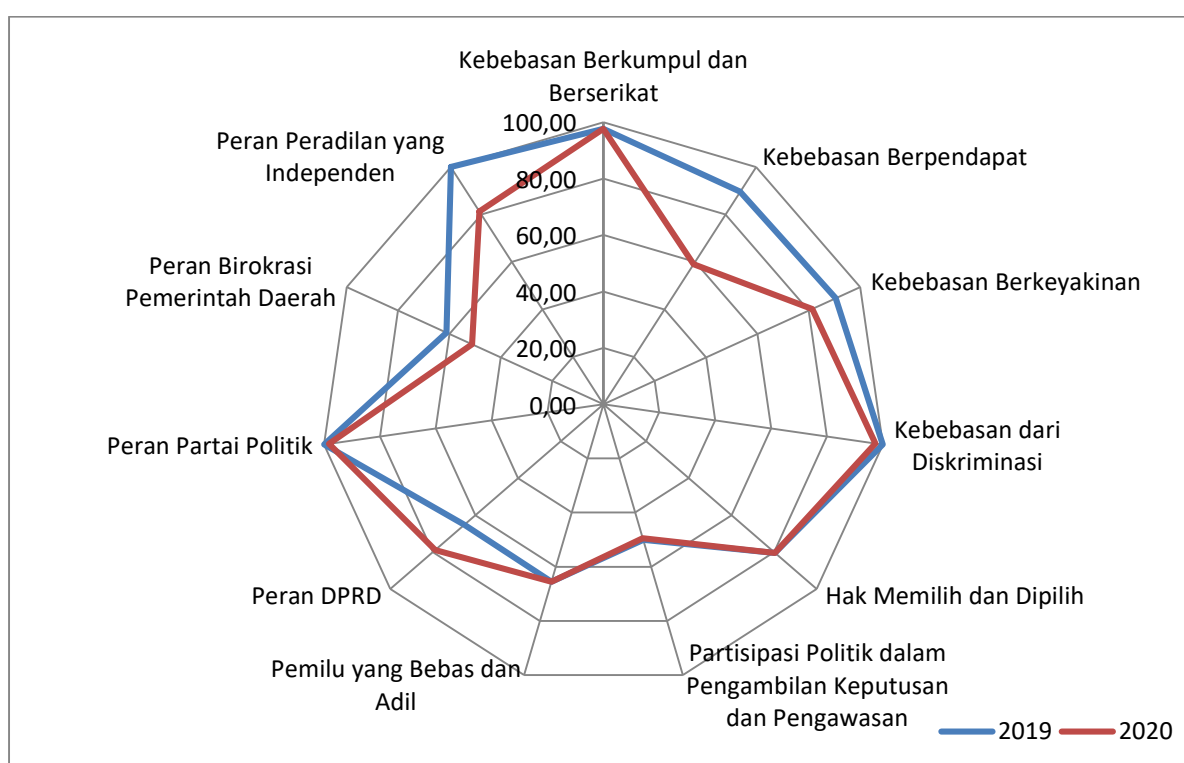
Pada tiga aspek demokrasi yang diukur pada tahun 2020, indeks aspek Kebebasan Sipil mengalami penurunan sebesar 8,79 poin dibandingkan tahun 2019. Sementara itu, nilai indeks aspek Hak-Hak Politik turun 0,28 poin dan Lembaga Demokrasi turun sebesar 4,17 poin.

Serupa dengan tahun 2019, pada tahun 2020 tidak ada lagi indeks aspek yang berkategori “buruk”. Indeks aspek Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi tetap pada kategori “sedang”, sementara aspek Kebebasan Sipil tetap berada pada kategori “baik”.

3. Perkembangan Indeks Variabel IDI Provinsi Aceh

Pada tahun 2020 terdapat delapan variabel yang mengalami penurunan indeks, satu variabel yang mengalami peningkatan dan dua variabel tetap. Dari delapan variabel yang mengalami penurunan, variabel kebebasan berpendapat menurun paling tajam yaitu sebesar 30,59 poin, dari 89,59 pada 2019 menjadi 59,00 pada 2020. Di sisi lain, variabel yang mengalami peningkatan terdapat pada variabel peran DPRD yang meningkat sebesar 13,67 poin dari 65,15 pada tahun 2019 menjadi 78,82 pada tahun 2020. Angka perkembangan indeks variabel secara rinci dapat dilihat pada Grafik 3.

Grafik 3. Perkembangan Indeks Variabel IDI Provinsi Aceh, 2019-2020



4. Perkembangan Skor Indikator IDI Provinsi Aceh

Pada IDI 2020, dari 28 indikator terdapat 20 yang mencapai kinerja kategori “baik” (skor di atas 80), meliputi:

- Indikator 1, Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Aparat Pemerintah yang Menghambat Kebebasan Berkumpul dan Berserikat,
- Indikator 2, Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Masyarakat yang Menghambat Kebebasan Berkumpul dan Berserikat,
- Indikator 5, Aturan Tertulis yang Membatasi Kebebasan Menjalankan Ibadah Agama,
- Indikator 6, Tindakan/Pernyataan Pejabat yang Membatasi Kebebasan Menjalankan Ibadah Agama,

- e. Indikator 8, Aturan Tertulis yang Diskriminatif dalam Hal Gender, Etnis, dan Kelompok,
- f. Indikator 9, Tindakan/Pernyataan Pejabat yang Diskriminatif dalam Hal Gender, Etnis, dan Kelompok,
- g. Indikator 10, Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Masyarakat Karena Alasan Gender, Etnis, dan Kelompok,
- h. Indikator 11, Hak Memilih atau Dipilih Terhambat,
- i. Indikator 12, Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih,
- j. Indikator 13, Kualitas daftar pemilih tetap (DPT),
- k. Indikator 14, Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout).
- l. Indikator 17, Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan
- m. Indikator 19, Kecurangan dalam Penghitungan Suara,
- n. Indikator 20, Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan dalam APBD
- o. Indikator 22, Rekomendasi DPRD kepada eksekutif
- p. Indikator 23, Kegiatan Kaderisasi yang Dilakukan Peserta Pemilu, dan
- q. Indikator 24, Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik,
- r. Indikator 28, Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi

Meskipun demikian, masih terdapat juga kinerja indikator demokrasi yang memiliki skor di bawah 60 di tahun 2020. Indikator-indikator yang termasuk dalam kategori tersebut adalah:

- a. Indikator 4, Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Masyarakat yang Menghambat Kebebasan Berpendapat,
- b. Indikator 7, Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama,
- c. Indikator 15, Persentase Perempuan Terpilih terhadap Total Anggota DPRD Provinsi,
- d. Indikator 16, Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan
- e. Indikator 18, Keberpihakan KPUD dalam Penyelenggaraan Pemilu,
- f. Indikator 21, Persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan
- g. Indikator 25, Jumlah kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN
- h. Indikator 26, Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah

Indikator-indikator tersebut di atas memerlukan perhatian khusus dari semua pihak agar nilainya dapat meningkat.

5. Penjelasan Teknis

Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat bukan sesuatu hal yang mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia maka sejak tahun 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama stakeholder lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (KEMENKOPOLHUKAM), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), dan Tim Ahli yaitu Prof. Maswadi Rauf (UI), Prof. Musdah Mulia (UIN Syarif Hidayatullah), Dr. Syarif Hidayat (LIPI), dan Dr. Abdul Malik Gismar (Universitas Paramadina) merumuskan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).

IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur. Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia. IDI tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja. Namun juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama semua stakeholder, tidak hanya pemerintah saja.

Komponen Penghitungan IDI 2009 – 2020

Aspek	Variabel	Indikator *)
1. Kebebasan Sipil	1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	2 indikator
	2. Kebebasan Berpendapat	2 indikator
	3. Kebebasan Berkeyakinan	3 indikator
	4. Kebebasan dari Diskriminasi	3 indikator
2. Hak-Hak Politik	5. Hak Memilih dan Dipilih	5 indikator
	6. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan	2 indikator
3. Lembaga Demokrasi	7. Pemilu yang Bebas dan Adil	2 indikator
	8. Peran DPRD	3 indikator
	9. Peran Partai Politik	2 indikator
	10. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	2 indikator
	11. Peradilan yang Independen	2 indikator

Catatan: *) = rincian indikator dapat dilihat pada Tabel 2

Pengumpulan data IDI mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai tahapan yang saling melengkapi. Pada tahap pertama data kuantitatif dikumpulkan dari koding surat kabar dan dokumen tertulis seperti Perda atau peraturan dan surat keputusan kepala daerah, yang sesuai dengan indikator-indikator IDI. Temuan-temuan tersebut kemudian diverifikasi dan dielaborasi melalui Focus Group Discussion (FGD) sebagai tahap pengumpulan data kedua, sekaligus menggali kasus-kasus yang tidak tertangkap di koding surat kabar/dokumen. Pada tahap ketiga data-data yang telah terkumpul tersebut diverifikasi melalui wawancara mendalam dengan nara sumber yang kompeten memberikan informasi tentang indikator IDI. Semua tahapan pengumpulan data dilakukan oleh BPS Provinsi, diolah di BPS RI, dan diverifikasi oleh Dewan Ahli beserta mitra kerja lain pada semua tahapannya

Penghitungan IDI melalui tiga tahapan proses yakni pertama, menghitung skor akhir untuk setiap indikator; kedua, menghitung indeks provinsi; dan ketiga, menghitung indeks keseluruhan atau IDI Nasional. Ketiga tahapan ini secara hierarkis terkait satu dengan yang lain. Skor masing-masing indikator IDI (28 indikator) di setiap provinsi memberikan kontribusi dalam penghitungan indeks 11 variabel IDI, selanjutnya indeks 11 variabel memberikan kontribusi terhadap penghitungan indeks tiga aspek IDI. Komposit indeks ketiga aspek IDI inilah yang merefleksikan indeks demokrasi di masing-masing provinsi. Dan pada akhirnya komposit indeks provinsi menentukan IDI Nasional.

Untuk menggambarkan capaian tingkat demokrasi dalam IDI digunakan skala 0 – 100. Skala ini merupakan skala normatif di mana 0 adalah tingkat terendah dan 100 adalah tingkat tertinggi. Tingkat terendah (nilai indeks = 0) secara teoretik dapat terjadi bila semua indikator mendapatkan skor yang paling rendah (skor 0). Sebaliknya, tingkat tertinggi (nilai indeks = 100) secara teoritik dimungkinkan apabila seluruh indikator memperoleh skor tertinggi. Selanjutnya, untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks yang dihasilkan, skala 0 – 100 tersebut dibagi ke dalam tiga kategori tingkat demokrasi, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).

6. Tabel-Tabel

Tabel 1. Perkembangan Indeks Variabel IDI Provinsi Aceh , 2019-2020

No	Nama Variabel	2019	2020	Selisih
Kebebasan Sipil				
1	Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	97,66	97,66	0,00
2	Kebebasan Berpendapat	89,59	59,00	-30,59
3	Kebebasan Berkeyakinan	90,49	81,38	-9,11
4	Kebebasan dari Diskriminasi	100,00	97,39	-2,61
Hak-Hak Politik				
5	Hak Memilih dan Dipilih	80,44	80,44	-0,62
6	Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	50,00	49,45	-0,55
Lembaga Demokrasi				
7	Pemilu yang Bebas dan Adil	65,51	65,51	0,00
8	Peran DPRD	65,15	78,82	13,67
9	Peran Partai Politik	100,00	98,28	-1,72
10	Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	61,17	51,20	-9,97
11	Peran Peradilan yang Independen	100,00	81,25	-18,75

Tabel 2. Perkembangan Skor Indikator 2019 dan 2020 Provinsi Aceh

Nomor	Indikator	2019	2020
Kebebasan Sipil			
1	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100,00	100,00
2	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	81,25	81,25
3	Ancaman /penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	87,50	70,83
4	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	100,00	0,00
5	Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	95,65	95,65
6	Tindakan/ Pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	90,63	81,25
7	Ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama	70,00	25,00
8	Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok	100,00	100,00
9	Tindakan/ Pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok	100,00	90,63
10	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, kelompok	100,00	100,00
Hak-Hak Politik			
11	Hak memilih atau dipilih terhambat	94,23	94,23
12	Kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih	96,14	96,14
13	Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)	81,06	81,06
14	Voters turnout	81,85	81,85
15	Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Propinsi	37,03	37,03
16	Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan	00,00	0,00
17	Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	100,00	98,90
Lembaga Demokrasi			
18	Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu	50,00	50,00
19	Kecurangan dalam penghitungan suara	81,01	81,01
20	Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan	82,93	95,55
21	Perda yang merupakan inisiatif DPRD	46,16	0,00
22	Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif	17,86	85,71
23	Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu	100,00	100,00
24	Persentase perempuan pengurus partai politik	100,00	82,83
25	Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN	44,74	52,63
26	Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah	75,00	50,00
27	Keputusan hakim yang kontroversial	100,00	62,50
28	Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	100,00	100,00

Diterbitkan oleh:



Konten Berita Resmi Statistik dilindungi oleh Undang-Undang, hak cipta melekat pada Badan Pusat Statistik. Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi tulisan ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.